

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Debitur tetap bertanggung jawab dari debitur untuk melunasi pinjaman yang telah disepakatinya, terlepas dari persoalan apapun yang menimpa debitur tersebut termasuk persoalan perceraian, karena tanggung jawab melunasi kredit secara hukum tidak akan hilang, karena perjanjian kredit telah berlaku sebagai perjanjian sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1338 KUHPerdara Indonesia, dimana perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya. Kewajiban utama dari debitur di dalam perjanjian kredit adalah melunasi pinjaman kepada Bank.
2. Akibat hukum perceraian terhadap pelaksanaan kredit yaitu dapat menimbulkan permasalahan dalam pembayaran angsuran, karena apabila perceraian debitur, menimbulkan kemampuan pembayaran angsuran debitur menurun, sehingga Bank melakukan solusi-solusi dalam melakukan penagihan kredit. Penagihan kredit secara langsung oleh bank merupakan upaya Pertama yang dilakukan sebagai antisipasi atau tindakan prefentif atas gejala awal munculnya kredit bermasalah, Nasabah dapat memohonkan Prosedur dan cara restrukturisasi kredit, penyerahan penagihan kredit bermasalah kepada pihak ketiga, lelang agunan, juga pemberian keringanan pembayaran tunggakan bunga dan denda. Dalam melakukan penagihan dapat dipedomani yaitu inventarisasi data tunggakan dan permasalahan yang menyebabkan kredit bermasalah. Lalu menetapkan prioritas penagihan dan melakukan pendekatan secara persuasif dengan

nasabah dengan menyurati dan memanggil ke Kantor Bank Nagari Cabang Bukittinggi, atau petugas melakukan kunjungan rutin ke tempat nasabah berdomisili maupun berusaha. Setelah terjadinya pertemuan kedua belah pihak membicarakan penyebab terjadinya kredit bermasalah yang mana dalam pembicaraan tersebut juga membahas langkah untuk penyelamatan/penyelesaian kredit.

B. SARAN-SARAN

1. Debitur dan Pihak harus selalu mengutamakan kerjasama dan prinsip itikad baik dalam penyelesaian kredit bermasalah, sehingga pelaksanaan kredit setelah terjadinya perceraian dapat diselesaikan dengan baik, karena tanggung jawab debitur dalam melunasi kredit tidak akan hilang secara hukum meskipun terjadi perceraian.
2. Pihak bank haruslah selalu memperhatikan tahapan dalam menghadapi kredit bermasalah yakni, melakukan Penagihan kredit secara langsung atas gejala awal munculnya kredit bermasalah. Dalam melakukan penagihan dapat dipedomani yaitu inventarisasi data tunggakan dan permasalahan yang menyebabkan kredit bermasalah. Lalu menetapkan prioritas penagihan dan melakukan pendekatan secara persuasif dengan nasabah dengan menyurati dan memanggil ke Kantor Bank Nagari Cabang Bukittinggi, atau petugas melakukan kunjungan rutin ke tempat nasabah berdomisili maupun berusaha. Setelah terjadinya pertemuan kedua belah pihak membicarakan penyebab terjadinya kredit bermasalah yang mana dalam pembicaraan tersebut juga membahas langkah untuk penyelamatan/penyelesaian kredit.